

ABSTRAK

PENERAPAN PSAK No. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus Pada Yayasan X)

Oleh:
Andro Maruli Mesakh

Pembimbing:
Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan Yayasan dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.45. Penelitian ini bersifat deskriptif, menekankan pada proses, dan analisis data secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Yayasan mengacu pada ketentuan PSAK No.45, yaitu penyajian laporan keuangan mengenai laporan aktivitas dan laporan arus kas. Adapun mengenai laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa Yayasan X belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK No.45. Faktor yang menyebabkan Yayasan X salah melaporkan posisi laporan keuangan dikarenakan sistem atau *software* yang digunakan masih belum di sempurnakan. Sedangkan Catatan atas laporan keuangan menunjukkan Yayasan X belum membuat sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK No.45 dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh yayasan dan masih digunakan sistem yang lama dalam proses penyusunan laporan keuangan khususnya catatan laporan keuangan. Yayasan disarankan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem atau *software* yang dimiliki sehingga memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan PSAK No. 45 dalam proses pelaporan keuangan.

Kata Kunci: PSAK No. 45, Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Yayasan

PENDAHULUAN

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai suatu standar khusus yang berlaku rinci terkait dengan organisasi nirlaba, walaupun telah dinyatakan secara teoritikal bahwa PSAK 45 merupakan standar bagi organisasi nirlaba. Keterbatasan ruang lingkup serta acuan pengaturan membuat penerapan atas standar ini tidak berjalan efektif (hanya bersifat teoritikal) hingga IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan *exposure draft* atas standar bagi organisasi nirlaba yang kemudian menjadi PSAK 45 (revisi 2010) yang dijalankan secara efektif pada 1 Januari 2012. Standar bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dalam hal ini awalnya berdasarkan PSAK 45 (1997) yang berlaku adalah SAK Umum. Namun, kini secara spesifik atas organisasi nirlaba

yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik diatur berdasarkan dengan SAK ETAP (melakukan penerapan atas SAK ETAP).

Dengan menerapkan SAK ETAP maka terkait dengan metode maupun kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan tentunya akan lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi entitas nirlaba yang umumnya memiliki transaksi-transaksi yang cenderung tidak terlalu kompleks layaknya entitas profit. Dengan kata lain, akan mempermudah entitas nirlaba dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penilaian atas transaksi yang terjadi dengan adanya penerapan SAK ETAP dalam PSAK Nomor 45 (revisi 2010). Dengan melihat perubahan, perkembangan peraturan dan standar yang semakin lengkap dan kompleks atas organisasi nirlaba, dapat dijadikan sebagai bukti bahwa keberadaan organisasi nirlaba dalam tatanan perekonomian adalah signifikan dan memiliki dampak. Dampak positif yang diharapkan atas adanya revisi PSAK 45 tersebut, adalah laporan keuangan organisasi nirlaba semakin relevan, memadai, lebih mudah dipahami, dan memiliki daya banding yang tinggi. Namun, di sisi lain tidak dapat dipungkiri pula bahwa dengan adanya perubahan atas peraturan tersebut dapat menyebabkan suatu konflik baru yaitu apakah perubahan yang ada dapat tetap membuat kesesuaian atau sebaliknya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan standar-standar yang berlaku, antara lain: SAK Umum, SAK ETAP, dan PSAK 45.

Adapun objek yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu berupa yayasan sekolah yang memiliki transparansi sehingga pencatatan atas jurnal, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan atas laporan keuangan yang dimiliki dapat diketahui dan diberikan rekomendasi agar laporan keuangan yang dimiliki sesuai dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan yang dimiliki oleh objek penelitian yakni Yayasan telah disajikan dan diungkapkan secara rutin dari periode ke periode, namun laporan keuangan ini belum pernah diaudit/dilakukan pemeriksaan baik terhadap kewajaran atas saldo yang dimiliki maupun kepatuhan terhadap penerapan standar yang berlaku. Sehingga, penyajian dan pengungkapan atas akun dalam laporan keuangan yang dimiliki belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian perlu dilakukan analisis lebih lanjut perihal pengakuan, pengukuran, penilaian (pengukuran lanjutan) yang menjadi satu kesatuan saling terkait satu sama lainnya.

Analisa atas kerangka dasar akuntansi dapat memberikan esensi lebih atas laporan keuangan yang dimiliki oleh Yayasan terutama dalam penerapan standar akuntansi sehingga patuh dan memiliki akuntabilitas. Pengembangan wawasan atas standar akuntansi terkait pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba menjadi salah satu hal lainnya yang ingin dicapai oleh Yayasan.

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penyajian laporan keuangan yayasan X yang telah diterapkan dana apakah laporan keuangan yayasan X sudah sesuai dengan PSAK 45.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini ditujukan untuk: Menganalisis dan membantu penyusunan laporan keuangan Yayasan X dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.45.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak diteliti, maka metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:13), penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna. Pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam studi ini karena evaluasi penerapan PSAK no.45 yang dilakukan yayasan akan lebih dipahami dengan cara membandingkan kebijakan perusahaan dan kegiatan operasionalnya terkait dengan PSAK no. 45 tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana PSAK no. 45 diterapkan di suatu yayasan.

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada yayasan X yang berpusat di kota Batu. Yayasan X dipilih karena yayasan tersebut dikelola oleh keluarga saya dan yang berdasarkan satatus bulan Januari 2012 sudah mengimplementasikan PSAK no. 45. Periode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari 1 Januari 2012 – 31 Desember 2012. Alasan dipilihnya data pada periode tersebut adalah karena penerapan PSAK no.45 baru berlaku aktif di yayasan mulai tanggal 1 Januari 2012 sehingga data yang kompeten untuk diteliti adalah data per 31 Desember 2012

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu: 1) Data Primer, berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai struktur organisasi, aktivitas operasional yang terjadi, dan gambaran umum organisasi. 2) Data Sekunder, berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan keuangan Yayasan tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalita. Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik pada masalah yang bersangkutan (pelaporan keuangan Yayasan), karena terbatasnya studi atau penelitian (termasuk literatur-literatur) yang membahas mengenai pelaporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntansi

Dasar Pencatatan

Dasar pencatatan yang digunakan pada Yayasan X terbagi menjadi beberapa unsur, dimana unsur-unsur terkait secara langsung dengan kegiatan pengendalian akuntansi yang dilakukan sebagai dasar dalam proses pencatatan. Adapun dasar pencatatan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi Yayasan X adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan X dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap Anggaran dan Antar Periode.
2. Pelaporan keuangan X adalah laporan pertanggungjawaban X atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (Revisi 2010).

Berdasarkan tujuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam kebijakan akuntansi yang ditetapkan pada Yayasan X pengukuran dalam proses penyajian anggaran keuangan dengan realisasi antar periode pelaporan akuntansi. Selain itu tujuan yang akan dicapai yaitu penerapan posisi keuangan yayasan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

b. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yayasan yang meliputi :

1. Entitas pelaporan Keuangan
2. Basis akuntansi
3. Laporan keuangan gabungan
4. Kas dan setara kas
5. Piutang
6. Persediaan
7. Aset tetap
8. Pertukaran aset tetap
9. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (*subsequent expenditures*)
10. Penyusutan aset tetap
11. Penilaian kembali aset tetap (*revaluation*)
12. Penghentian dan pelepasan (*retirement and disposal*)
13. Kewajiban
14. Penerimaan
15. Beban

16. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa

Dalam proses pelaporan tersebut menunjukkan bahwa Yayasan X berupaya untuk melakukan proses penyusunan palaporan keuangan seperti yang telah ditetapkan pada Standar Akuntansi Keuangan No. 45, dimana dalam ruang lingkup dalam pelaporan keuangan oleh organisais nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang/ jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba, dan kalau suatu entitas meghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak kepemilikan lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa dalam kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditentukan bahwa laporan keuangan nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya.

c. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan yayasan X atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yayasan terkait dengan kewajiban akuntasinya.

d. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yayasan X yaitu basis akrual. Dalam konsep ini penerimaan dan biaya bertambah dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba rugi selama periode yang bersangkutan.

e. Laporan Keuangan Gabungan

Laporan keuangan gabungan disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pelaporan gabungan dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Perlakuan Aktiva Tetap (*Fixed Asset*)

1. Aset Tetap

Pengakuan

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 5) Biaya perolehan tidak kurang dari Rp500.000,-.
- b. Pengakuan aset tetap dilakukan saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- c. Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- e. Aset tetap yang diperoleh dengan pengalihan dari unit kerja lain dicatat sebesar nilai buku pada saat perolehan.

2. Pertukaran Aset Tetap

1. Pertukaran aset tetap tidak sejenis
Biaya perolehan aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Pertukaran aset tetap sejenis
Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.

3. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 10% dari harga perolehan.

4. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Aset Neto.

5. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

1. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset bersejarah jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a) Mempunyai nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
2. Aset bersejarah tidak disajikan di Laporan Posisi Keuangan namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Pendapatan

- a. Pendapatan diakui dalam periode berjalan pada saat ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria sebagai berikut: 1) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam yayasan; dan 2) mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pengembalian/koreksi yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- e. Pengembalian/koreksi yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berkenaan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dibukukan sebagai pengurangan aset neto pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pencatatan Transaksi dan Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses transaksi dan proses penyusunan laporan keuangan Yayasan X dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan pelaporan posisi keuangan pada Yayasan X menunjukkan bahwa pada periode pelaporan posisi keuangan tahun 2011 dan 2012 belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.45.

Pelaporan tersebut dapat dibuktikan dengan 1) Adanya akun pos silang di kelompok aktiva lain, yang seharusnya akun tersebut tidak boleh ada di dalam Laporan Posisi Keuangan. 2) Ditemukanya ketidakwajaran dalam angka atau jumlah yang terdapat di dalam akun Tunai-Kas Kecil (2011), Rek Bank BCA – RIN (2012), Piutang Pendapatan Sekolah (2011&2012), Utang Gaji (2012), Kredit Jangka Panjang – Lembaga Keuangan (2011&2012), dan Asset Netti Tidak Terikat (2011&2012). 3) Tidak Balance hasil dari Laporan Posisi Keuangan yang telah dibuat oleh Yayasan X pada Tahun 2012.

Adapun untuk membuktikan kenyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dengan bendahara Yayasan X, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Semenjak awal tahun 2012 yayasan ini sudah menggunakan sistem atau software dalam melaporkan laporan keuangan. Saya melihatnya ada pos silang ini terjadi karena kesalahan dalam penginputan transaksi ya, uang yang ada di pos silang itu sudah dibayar dan seharusnya tidak muncul di laporan posisi keuangan, lalu untuk ketidakwajaran jumlah di kas, bank bca itu bahkan tidak balancenya ini saya rasa sepenuhnya ini kesalahan software yang masih belum sempurna”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan yayasan X salah dalam melaporkan Laporan Posisi Keuangan dikarenakan penggunaan *software* atau sistem yang masih belum disempurnakan dan data yang belum di input ke dalam *software* atau sistem hingga memunculkan akun Pos Silang yang seharusnya tidak ada dalam Laporan Posisi Keuangan.

b. Laporan Aktivitas

Tujuan laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih (b) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi atas pencapaian kinerja dalam suatu periode (b) menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa dan (c) menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja manajer.

Berdasarkan laporan aktivitas pada Yayasan X menunjukkan bahwa pada periode penelitian menunjukkan telah menerapkan PSAK 45 dalam hal ini yayasan menggunakan penyajian dalam bentuk kolom tunggal. Pada dasarnya sistem pelaporan mengenai aktivitas memiliki tiga bentuk:

- a. Bentuk A menyajikan kolom tunggal, bentuk ini memudahkan penyusunan laporan aktivitas komparatif.
- b. Bentuk B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi bersih yaitu satu kolom untuk setiap klasifikasi dengan tambahan satu kolom untuk jumlah. Bentuk ini menyajikan dampak berakhirnya pembatasan oleh penyumbang aktiva tertentu terhadap reklasifikasi aktiva bersih. Bentuk ini juga memungkinkan penyajian informasi agregat mengenai sumbangan dan penghasilan dari proses investasi.
- c. Bentuk C menyajikan informasi dalam dua laporan dengan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban dan perubahan aktiva bersih tidak terikat disajikan dalam laporan perubahan aktiva bersih. Bentuk ini menitik beratkan perhatian pada perubahan aktiva bersih yang tidak terikat.

Kesesuaian dengan PSAK 45 yaitu ditunjukkan dengan adanya laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Adanya laporan kelompok aktiva bersih, klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, selanjutnya juga terdapat informasi pendapatan dan beban serta informasi mengenai pemberian jasa. Beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa Yayasan X telah menerapkan PSAK 45 dalam penyusunan laporan aktivitas.

c. Laporan Arus Kas

Dari hasil pelaporan arus kas tersebut menunjukkan bahwa terdapat nilai surplus dari hasil pelaporan, dimana nilai surplus mencapai Rp 68.552.523,00 dari total penerimaan dan pengeluaran pada periode tersebut. Dalam proses pelaporan Yayasan X telah melaporkan sesuai dengan PSAK 45, dimana dalam pelaporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Aktivitas pendanaan dalam hal ini terkait dengan penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi serta penggunaan bunga dan deviden yang dibatasi penggunaan untuk jangka panjang.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Yayasan X belum melaporkan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Standar Akuntansi Nomor 45. Adapun penyebab instansi tidak melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan

tersebut dikarenakan dua hal yaitu dikarenakan sumber daya yang dimiliki yayasan dan sistem yang diterapkan belum sempurna.

Adapun untuk membuktikan kenyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua Yayasan X, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Yayasan selama ini belum menyusun catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Nomor 45, dikarenakan yayasan belum memiliki pegawai atau sumber daya manusia yang mampu melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan tersebut. Selain itu selama ini yayasan juga memiliki suatu sistem laporan keuangan yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat di Standar Akuntansi Nomor 45 sehingga menjadikan bentuk laporan yang berbeda”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu X selaku bagian akuntansi yayasan X, dimana beliau juga mengatakan bahwa:

“Selama ini saya bekerja sesuai dengan sistem lama sehingga belum sepenuhnya menggunakan ketentuan yang terdapat pada Standar Akuntansi Nomor 45 dalam proses penyusunan catatan atas laporan keuangan. Jadi kami masih menggunakan sistem lama dalam proses penyusunan catatan atas laporan keuangan, selain itu merupakan bentuk dari keterbatasan kami selaku pengelola bagian keuangan sehingga dalam proses penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Standar Akuntansi Nomor 45.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Yayasan X belum melaporkan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Standar Akuntansi Nomor 45 dikarenakan adanya keterbatasan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh yayasan dan masih digunakan sistem yang lama dalam proses penyusunan laporan keuangan khususnya catatan laporan keuangan.

Selanjutnya peneliti akan menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan yang disesuaikan dengan PSAK 45, yang dapat disusun sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Umum

Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia didirikan berdasarkan akta notaris Nomor: 15 tanggal 4 Maret 1961. Akta notaris telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sementara Pasuruan. Sesuai dengan akta pendirian, tujuan utama didirikannya Yayasan adalah dalam bidang Keagamaan, yayasan berdomisili di Batu dan mulai aktif pada tahun 1961.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

Berikut adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan oleh Yayasan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

a. Prinsip Penyajian

Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Angka-angka yang disajikan dalam catatan atas Laporan Keuangan disajikan dalam Rupiah penuh.

- b. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan dari donatur diakui pada saat diterima (cash basis). Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).
- c. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, serta tidak dibatasi penggunaannya.
- d. Aktiva Tetap
Untuk tahun 2012, aktiva tetap belum dapat dibukukan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva masih dibukukan berdasarkan kas basis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak 1 Januari 2012 Yayasan X menggunakan sistem atau *software* yang mengacu pada PSAK No.45 untuk penyajian pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlakuan penyajian pelaporan keuangan Yayasan X belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.45. Hal-hal yang telah sesuai dalam penyajian laporan keuangan dengan PSAK No.45 mengenai laporan aktivitas dan laporan arus kas. Sedangkan hal-hal yang belum sesuai dengan PSAK No.45 adalah sebagai berikut:

1. Yayasan X salah dalam penyajian Laporan Posisi Keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK No.45. Faktor yang menyebabkan Yayasan X salah dalam penyajian Laporan Posisi Keuangan dikarenakan adanya penemuan pos silang yang masih ada dalam kelompok aktiva lain, yang seharusnya tidak muncul dalam Laporan Posisi Keuangan dan ketidak sempurnanya sistem atau *software* yang digunakan dalam penyajian Laporan Posisi Keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45.
2. Yayasan X belum melaporkan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK No.45. Faktor yang menyebabkan Yayasan X belum melaporkan catatan atas laporan keuangan dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh yayasan dan masih digunakan sistem yang lama dalam proses penyusunan laporan keuangan khususnya catatan laporan keuangan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat disajikan beberapa saran kepada yayasan terkait dengan penyajian laporan keuangan yaitu sebagai berikut: 1) Yayasan dalam penyajian laporan keuangan untuk sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada PSAK No. 45, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang disampaikan sehingga pihak-pihak yang terkait dapat dengan mudah untuk

melakukan evaluasi. 2) Disarankan kepada yayasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan PSAK No. 45 dalam proses pelaporan keuangan yang akan dilakukan.3) Yayasan disarankan untuk dengan segera melakukan pembaharuan atas sistem pelaporan yang digunakan selama ini sehingga aktivitas pelaporan keuangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4) Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun maka pihak yayasan harus menggunakan dasar PSAK No. 45 sebagai dasar proses penyusunan sehingga proses evaluasi atas kinerja yayasan dapat dikendalikan dengan baik.